

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin (Septy dan Devega 2022). Dan ini terbukti cukup berhasil dalam membantu ekonomi masyarakat-masyarakat miskin di negara negara berkembang, tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. implementasi dari BLT ini sendiri memberikan keleluasaan bagi pemerintah nagari atau untuk dapat menentukan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan BLT.

Dalam menentukan keputusan calon penerima bantuan BLT, pegawai harus mengumpulkan data penerima bantuan, dari data masyarakat yang berasal kurang mampu. Hal ini berdampak adanya bentuk subjektifitas di dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai, terutama jika beberapa calon penerima memiliki tingkat kelayakan yang tidak jauh, oleh karena itu dibutuhkannya sebuah Sistem Penunjang Keputusan dalam menentukan penerima bantuan BLT.

Sistem Penunjang Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manager dalam pengambilan keputusan (Firmanto n.d.). Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi

semi terstruktur dan situasi tidak terstruktur, dimana tidak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Handayani dan Hariyanti 2022). Untuk itu diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat memperhitungkan segala kriteria, yang mendukung Pengambilan keputusan sehingga dapat berguna membantu, mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan.

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik. Seperti melakukan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif-alternatif. Betapapun melebarnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun terperinci penjagaan nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar perbandingan berbentuk suatu kriteria yang tunggal. Peralatan utama *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah memiliki sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Reina Rahmona, Ika Purwati Niingrum 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis berupaya memecahkan hal tersebut dengan mengambil permasalahan yang berjudul: **“Analisa Dan Perancangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode *Analitycal Hierarchy Process* ( AHP ) Dalam Penetapan Penduduk Kurang**

## **Mampu Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur Ix Berbasis Web”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis membuat perumusan masalah yang akan di selesaikan yaitu :

1. Bagaimana membangun sebuah Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) yang dapat membantu Kantor Wali Nagari Durian Tinggi dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat agar dapat dilakukan dengan cepat dan akurat ?
2. Bagaimana menerapkan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi, agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat ?
3. Bagaimana data dapat diproses dan disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi ?

### **1.3 Hipotesa**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diberikan beberapa hipotesis terhadap permasalahan yang dihadapi, maka peneliti mengemukakan :

1. Diharapkan dengan membangun Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) yang dapat membantu Kantor Wali Nagari Durian Tinggi dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan akurat dalam mengatasi masalah Semi Terstruktur.
2. Diharapkan dengan menerapkan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

yang mampu dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi, agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.

3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL data dapat diproses dan disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang dimaksudkan penulis tidak meluas dan lebih terarah serta mudah dipahami, maka diperlukan adanya pembatasan permasalahan, yaitu:

1. Aplikasi SPK ini dibuat dengan ruang lingkup penentuan layaknya bantuan BLT di Kantor Wali Nagari Durian Tinggi yang hanya bertujuan untuk menentukan Masyarakat yang layak menerima bantuan BLT.
2. Sistem Pengambilan Keputusan ini menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP).
3. Perancangan sistem penunjang keputusan ini menggunakan bahasa Pemrograman PHP dan databse MySQL.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam membuat skripsi ini dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai adalah :

1. Untuk merancang dan membuat sebuah sistem pengambilan keputusan bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menggunakan metode AHP yang dapat mengolah kriteria dalam menentukan calon penerima

Bantuan Langsung Tunai (BLT).

2. Menerapkan metode AHP untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih efisien dan lebih tepat sasaran.
3. Memper mudah pegawai kantor wali desa dalam pemilihan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan BLT.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Wali Nagari Durian Tinggi dalam menyeleksi masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam penyelesaian berbagai masalah multikriteria.

#### **1. Bagi Pihak Akademik**

Secara tidak langsung telah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pendidikan dan makalah yang dihasilkan dari skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penerapan ilmu komputer khususnya pemrograman dan skripsi bagi mahasiswa lainnya.

#### **2. Bagi Mahasiswa**

Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan mahasiswa dapat membuat aplikasi penunjang pengambilan keputusan penerima bantuan BLT.

#### **3. Bagi Instansi**

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerima Bantuan Langsung Tunai.
- b. Memberikan kemudahan dalam setiap pemilihan masyarakat yang layak dalam menerima bantuan BLT.

## **1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Gambaran umum ini penulis mendapatkan data melalui metode observasi dan wawancara bahwasanya penulis mendapatkan data diantaranya yaitu berupa data primer. Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang perusahaan atau organisasi yang merupakan objek penelitian, mulai dari sejarah singkat, struktur organisasi serta tugas dan wewenang.

### **1.7.1 Sejarah Kantor Kelurahan**

Kenagarian Durian Tinggi yang masuk di dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kenagarian Durian Tinggi yang Luas wilayahnya 8.300 Ha yang terdiri dari 3 Jorong, yaitu : Cinta Maju, Bintungan Sakti, dan Ronah Pembangunan.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2022 nagari Durian Tinggi yang diperoleh dari kantor wali nagari Durian Tinggi itu sendiri, diperoleh bahwa jumlah Penduduk Nagari Durian Tinggi mencapai 3.319 jiwa.

Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki curah hujan rata-rata mencapai 2.537,86 mm<sup>3</sup>/tahun. Dengan kondisi daerahnya pun masih banyak hutan yang belum pernah digunakan sebelumnya yang terdiri dari perbukitan dan dataran rendah serta lahannya yang bergelombang.

Jika dilihat dari bentang wilayahnya, nagari Durian Tinggi berbatasan dengan :

1. Utara : Kampar
2. Selatan : Koto Lamo
3. Barat : Sialang
4. Timur : Koto Bangun

## 1.7.2 Struktur Kantor Wali Nagari Durian Tinggi



*Sumber : Kantor wali Nagari Durian Tinggi, Kec. Kapur IX, Kab. 50 Kota*

**Gambar 1. 1 Struktur Kantor Wali Nagari Durian Tinggi**

## 1.7.3 Tugas Dan Wewenang

Adapun pembagian tugas dan wewenang yang ada pada Kantor Wali Nagari Durian Tinggi sebagai berikut:

1. Wali Nagari Bertugas
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari.
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.
  - d. menetapkan Peraturan Nagari.
  - e. membina kehidupan masyarakat Nagari.

- f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- g. membina dan meningkatkan perekonomian serta.
- h. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat.
- i. mengembangkan sumber pendapatan.
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat.

## 2. Sekretaris Nagari

- a. Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari.
- b. Sekretaris Nagari bertugas membantu Kepala Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.

## 3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- a. Melaksanakan urusan ketata usahaan seperti tata naskah dinas.
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat.
- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi Pemerintahan Nagari.
- d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat.
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan Kantor.
- f. Penyiapan rapat-rapat.
- g. Pengadministrasian aset nagari.
- h. Pengadministrasian Inventarisasi Nagari

## 4. Kepala Urusan Perancangan dan Keuangan

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan.

- b. Menyusun RAPBDes.
  - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
  - d. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan
- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Nagari.
  - b. Menyusun rancangan regulasi.
  - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
  - d. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
  - e. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
  - f. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah nagari.
  - g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Nagari.
6. Kepala Seksi kesejahteraan dan Layanan
- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya.
  - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.
  - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik.
  - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.
  - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga.
  - f. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

- g. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- h. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.

7. Staf

- a. Membantu pekerjaan kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan.

8. Kepala Kampung/dusun

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.